

RINGKASAN

IIF MAHARANI PUTRI. Tinjauan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Bulan Januari-Maret 2022 di KPP Pratama Depok Cimanggis (*A Review of the Implementation of The Voluntary Disclosure Program (PPS) in January-March 2022 at KPP Pratama Depok Cimanggis*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar dan pendapatan terpenting dalam bidang pembangunan dan perekonomian. Di masa pandemi *Covid-19*, pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang salah satu isinya yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya yang belum terpenuhi.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis, jumlah wajib pajak dan penerimaan PPS bulan Januari-Maret 2022 di KPP Pratama Depok Cimanggis, menjelaskan pengidentifikasian target wajib pajak terhadap pelaporan PPS, prosedur pembetulan dan pencabutan SPPH, serta upaya yang diterapkan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk meningkatkan penerimaan PPS. Laporan akhir ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis hingga 31 Maret 2022 sebanyak 441.980 wajib pajak. Pada bulan Januari terdapat sebanyak 14 wajib pajak yang mengikuti PPS dengan jumlah penerimaan Rp66.132.942,00, bulan Februari sebanyak 20 wajib pajak dengan jumlah penerimaan Rp 929.636.616,00 dan bulan Maret sebanyak 34 wajib pajak dengan jumlah penerimaan Rp6.683.862.428,00. Selain itu, wajib pajak dapat melakukan pembatalan SPPH yang sudah dilaporkan secara individu dengan mengunjungi halaman *website* djponline.pajak.go.id. Pembatalan SPPH dapat dilakukan sampai dengan periode PPS berakhir yaitu 30 Juni 2022.

KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki peran sebagai wadah penerimaan pelaporan PPS dan juga berperan sebagai konsultan bagi wajib pajak apabila terdapat harta yang tidak sesuai dengan surat himbauan yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis dalam meningkatkan penerimaan PPS yaitu dengan cara memaksimalkan peran AR, sosialisasi melalui media konvensional dan digital, melakukan pemasangan spanduk dan menyebarkan brosur, serta memberikan penyuluhan terkait dengan pengisian SPPH.

Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Penerimaan, Pelaporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.